



## Kembali, Skema KKN UNTIDAR: Apakah Lebih Baik?

**S**ebanyak 1.593 mahasiswa Universitas Tidar (UNTIDAR) sukses melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode Juli-Agustus 2024. Kegiatan berlangsung pada 9 Juli-10 Agustus 2024. Tercatat 152 kelompok diterjunkan di 68 desa yang berada di 8 kecamatan Kota dan Kabupaten Magelang.

Sama seperti periode sebelumnya, KKN ini dilaksanakan guna mewedahi mahasiswa agar dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam kehidupan masyarakat. Harapannya para mahasiswa dapat memberikan kontribusi positif secara nyata terhadap permasalahan sosial yang ada di Kota dan Kabupaten Magelang.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNTIDAR sebagai badan yang bertanggung jawab mengelola kegiatan KKN,

mewajibkan setiap kelompok melaksanakan minimal tiga program yang terdiri satu program wajib dan dua program pilihan selama kegiatan berlangsung.

"Di Kota Magelang, program wajibnya adalah penurunan angka stunting. Kalau di Kabupaten Magelang, program wajibnya yaitu penanganan anak yang tidak bersekolah," jelas Kepala LPPM UNTIDAR, Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati M.Si., saat pelepasan mahasiswa KKN, (9/7/2024).

Penetapan program wajib bertujuan untuk menciptakan dampak yang signifikan dan terukur serta memastikan bahwa upaya mahasiswa sejalan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Namun, apakah seluruh skema tersebut sudah terlaksana sebagaimana mestinya?

## Skema Timeline yang Porak-Poranda

Pelaksanaan KKN UNTIDAR Juli-Agustus 2024 dilaksanakan lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Hal itu terjadi karena adanya perubahan kalender akademik kampus. Kalender akademik menjadi acuan untuk pelaksanaan semua kegiatan di kampus, salah satunya KKN. Pihak LPPM pun sudah mengatur jadwal sejak tiga bulan sebelum pelaksanaan KKN. Tetapi adanya informasi perubahan kalender akademik mengakibatkan pelaksanaan KKN akhirnya dimajukan lebih awal. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan KKN tidak bentrok dengan jadwal akademik dan pengisian KRS mahasiswa.

## Penolakan Desa Mahasiswa KKN

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2024 secara teknis berjalan dengan baik. Namun, masih ada hal yang tidak lepas dari permasalahan, seperti penolakan desa dan pandangan tinggi masyarakat terhadap mahasiswa KKN. Persepsi masyarakat tentang kampus yang memberikan dana membuat masyarakat secara terang-terangan meminta *living cost*. Pihak LPPM UNTIDAR menyampaikan bahwa konsep KKN tidak diwajibkan untuk tinggal di lokasi, tetapi jam SKS harus terpenuhi. Pihak kampus lebih mengutamakan kualitas kegiatan yang diadakan dibandingkan mahasiswa menetap di lokasi. Hal tersebut mengingat KKN UNTIDAR memang tidak

ada pungutan ataupun pemberian biaya dari kampus.

Penolakan desa terhadap mahasiswa KKN sudah menjadi hal yang biasa, sebab bukan pertama kalinya terjadi pada KKN UNTIDAR. Penolakan tersebut bisa disebabkan oleh perilaku mahasiswa, seperti mendatangi lokasi tanpa dosen pendamping atau tidak ada komunikasi secara langsung dengan pihak desa. Mengatasi permasalahan penolakan desa, pihak LPPM merelokasi ke desa-desa binaan UNTIDAR. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan baik desa binaan dengan UNTIDAR, sehingga desa binaan dapat menerima berapa pun jumlah tim KKN.

Pembagian desa KKN dilakukan oleh Bapperida, apabila terjadi penolakan, Bappeda sudah memiliki desa cadangan. Sebelum pelaksanaan KKN, Bapperida mengadakan forum yang dihadiri oleh perangkat desa lokasi KKN dan pihak LPPM. Pada forum tersebut, terdapat *form* kesediaan untuk perizinan KKN dan form kesediaan jumlah kelompok yang akan melaksanakan KKN di desa. Hal ini dilakukan agar saat pelaksanaan KKN tidak terjadi penolakan dan dapat berjalan efektif.

“Untuk KKN selanjutnya rencananya akan ada perkembangan desa. Tidak hanya di dalam Magelang tetapi berkembang juga ke wilayah luar, seperti Sragen, Bantul, dan Wonosobo. Namun, tidak semua kelompok dapat melakukan KKN di luar sehingga



nanti akan ada proses seleksi untuk kelompok yang akan melaksanakan KKN di luar Magelang," terang Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si., selaku Koordinator Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.

## Penolakan Desa dari Sudut Pandang Kelompok KKN

KKN UNTIDAR dilaksanakan dalam dua periode, pertama pada tanggal 4 Juli hingga 10 Agustus 2024, dilanjut periode kedua pada tanggal 6 Januari hingga 7 Februari 2025. Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan yang membuat KKN tidak berjalan maksimal, salah satunya adalah penolakan tempat KKN. Penolakan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu kurang komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa dengan LPPM.

Sama halnya dengan salah satu kelompok KKN UNTIDAR yang mendapat penolakan tempat di Desa Pringombo, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ketua kelompok KKN, Habib Hussein Al Azizi, mengatakan bahwa kelompoknya mendapat penolakan lima hari sebelum pelaksanaan. Hal itu karena Desa Pringombo hanya menerima satu kelompok KKN.

"Biasanya, Dusun Pringombo hanya menerima satu kelompok KKN yang akan ditempatkan di aula balai desa. Nah, kebetulan untuk tahun ini di Pringombo itu ada dua kelompok dari kampus. Jadi satu kelompok ada sepuluh orang, dua kelompok dua puluh orang. Makanya, dari sana tidak menyiapkan posko lebih," jelas Habib.

Sementara itu, perangkat Desa Pringombo tidak mengetahui jika terdapat dua kelompok. Menurut informasi yang didapatkan, hanya akan ada satu tim KKN dari UNTIDAR. Pada bulan Januari, Desa Pringombo sempat kedatangan satu kelompok KKN

sehingga untuk tahun 2024, perangkat desa hanya memperkirakan satu kelompok saja.

Di lain sisi, Habib juga mengatakan jika kelompoknya belum melakukan survei di lokasi setempat dan membuatnya kebingungan. Setelah melakukan koordinasi dengan beberapa perangkat desa dan perwakilan masyarakat desa selama tiga hari, akhirnya ia menemukan posko di rumah warga dengan tata tertib yang telah ditentukan.

## Bagaimana Nasib Tim KKN Desa Pringombo?

"Tidak pindah desa. Untuk solusi pindah desa sebenarnya dari DPL juga menyarankan. Jadi sempat ada kepikiran untuk pindah desa. Di dekat Pringombo itu ada desa Desa Temanggal. Sebenarnya, mau digeser ke sana, tapi kan ada urusan administrasi yang lebih panjang ketika ke LPPM nanti. Jadinya tetap diusahakan bagaimana caranya tetap di Pringombo," terang Habib.

Solusi untuk penolakan tempat diserahkan kepada mahasiswa. Pihak LPPM sekedar membagi tempat dan kelompok, sedangkan urusan tempat tinggal menjadi kewenangan kelompok masing-masing. Akhirnya, kelompok terkait harus mencari solusi sendiri dengan Dosen Pendamping Lapangan (DPL). LPPM sempat menawarkan alternatif untuk pindah desa. Namun, alternatif tersebut dinilai beresiko karena harus mengurus perizinan ke LPPM. Adapun solusi lain yang ditawarkan yaitu mencari kos di daerah setempat. Namun, hal ini tetep menjadi kontra bagi tim KKN.

Tentunya, penolakan tempat KKN ini menyebabkan pengeluaran dana kelompok tersebut menjadi bertambah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti listrik, air, dan koneksi internet. Beruntung, penolakan tempat tidak berakhir hingga

berdampak pada program kerja tim KKN Pringombo. Respon warga untuk KKN saat ini terbilang cukup positif. Menurut Habib, warga banyak melakukan interaksi sehingga kedekatan dengan warga terjalin baik.

## Kicauan Menanggapi Perubahan Kelompok KKN

Pembagian kelompok KKN 2024 berbeda dengan sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, mahasiswa dibebaskan untuk memilih sendiri, sedangkan pada KKN 2024 pembagian kelompok sudah diatur oleh kampus. Namun demikian, ditemukan bahwa tidak ada keseimbangan perbandingan, seperti contoh jumlah satu kelompok didominasi oleh mahasiswa FKIP. Meskipun pembagian kelompok sudah ditentukan oleh kampus, namun masih terdapat keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa.

Pada KKN 2024, mahasiswa mengeluhkan kelompok yang berubah-ubah. Mahasiswa yang sudah mendapatkan kelompok satu, tiba-tiba berubah menjadi kelompok dua. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lain seperti mahasiswa yang sudah mendaftar KKN, namun lolos program Merdeka Belajar Kampus Mengajar (MBKM). Pengumuman MBKM tersebut terkadang berdekatan dengan *timeline* pembagian kelompok KKN. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang lolos MBKM tidak dapat mengikuti KKN reguler, sehingga kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi LPPM sebab harus memastikan terlebih dahulu pengumuman MBKM sebelum pendaftaran KKN. Mengatasi hal itu, akhirnya pihak LPPM melakukan perubahan dalam pembentukan kelompok, sehingga menimbulkan tidak adanya kepuasan dari mahasiswa di luar program MBKM.

## Huru Hara Seputar KKN

Setiap periode KKN tidak lepas dari isu-isu hangat. Tak hanya seputar penolakan, permasalahan lain seperti anggota tim yang pasif juga menjadi salah satu masalah yang mewarnai KKN. Selain itu, KKN ini juga tak lepas dengan isu kekerasan seksual. Meski telah dilaksanakan pembekalan yang melibatkan Satgas PPKS, materi seputar kekerasan seksual, dan etika, rupanya belum diterapkan secara maksimal.

Mahasiswa yang terlibat dalam isu-isu tersebut tidak dapat langsung diberikan sanksi akademik, sebab hal ini berdampak pada pengurangan program KKN. Lalu, bagaimana dengan wewenang Satgas PPKS dalam memberikan sanksi? Satgas PPKS pun tidak dapat bergerak semudah itu untuk memberikan sanksi, sebab tetap harus menerima pengaduan terlebih dahulu dari korban, sementara tidak banyak korban yang melapor.

Melihat lain sisi, di kampus juga telah terdapat peraturan akademik yang mengatur tentang perilaku. Mahasiswa yang terlibat dalam isu-isu tersebut dapat dijatuhi sanksi oleh prodi, fakultas, hingga universitas, tergantung pada bentuk pelanggarannya.